

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Pelaporan dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan /pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.

2. Kedudukan

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Kpts/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Biro Kerja Sama Luar Negeri merupakan salah satu unsur pelaksana di Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal melaksanakan fungsi manajemen pendukung pembangunan pertanian dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, sedangkan Biro Kerja Sama Luar Negeri melaksanakan fungsi manajemen mendukung pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian khususnya pada aspek manajemen kerja sama luar negeri di bidang Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian.
2. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian.
3. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian.
4. Penyiapan kerja sama, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri
5. Pelaksanaan administrasi Atase Pertanian; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja sama Luar Negeri.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Susunan organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri dari :

- (1) Bagian Bilateral
- (2) Bagian Regional
- (3) Bagian Multilateral
- (4) Bagian Pengelolaan dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian;

Bagian Bilateral memiliki 3 Sub Bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik;
2. Sub Bidang Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan Negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa;
3. Sub Bidang Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan Negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

Bagian Regional memiliki 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan negara-negara di kawasan ASEAN;
2. Sub Bagian Non-ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan negara-negara di kawasan Non-ASEAN;
3. Sub Bagian Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan negara-negara di kawasan Intra Kawasan.

Bagian Multilateral memiliki 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang pangan, pertanian dan lingkungan;
2. Sub Bagian Organisasi Internasional Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional non-pemerintah;

3. Sub Bagian Organisasi Internasional Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional non-pemerintah;

Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri memiliki 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kerja sama dan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri dibidang pertanian;
2. Sub Bagian Administrasi Atase Pertanian mempunyai tugas melakukan penatausahaan kegiatan Atase Pertanian;
3. Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggal Biro Kerja Sama Luar Negeri

3. Visi dan Misi

Visi Biro Kerja Sama Luar Negeri adalah menjadi institusi terdepan dalam melaksanakan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang sehat, berintegritas dan dinamis.

Misi Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang efisien dan efektif.
2. Menyusun rumusan kebijakan kerja sama luar negeriyang mendukung Strategi Induk pembangunan pertanian nasional.
3. Menyusun program dan perencanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral.
4. Meningkatkan peran sebagai *leading* diplomasi dan negosiasi bidang pertanian di forum Internasional.
5. Mendiseminasikan hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang berkesinambungan.
6. Memantau dan mengevaluasi hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian.

7. Melaksanakan fungsi pelayanan organisasi yang prima.

2. Tujuan

Tujuan organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri periode tahun 2015 -2019, sebagai berikut :

1. Untuk menunjang tugas pertanian dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian di dunia internasional serta untuk mendorong meningkatnya ekspor produk pertanian.
2. Untuk menunjang perjuangan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan dunia melalui forum bilateral, regional dan multilateral.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia pertanian baik petani ataupun birokrat dengan memanfaatkan peluang kerja sama dibidang pendidikan dan latihan dengan negara mitra baik dalam forum bilateral, regional maupun multilateral.
4. Meningkatkan kerjasama bidang pertanian melalui pertemuan / sidang-sidang untuk meningkatkan pembangunan pertanian yang secara luas dapat meningkatkan kesejahteraan para petani baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral.
5. Menggali dan memanfaatkan peluang kerja sama melalui kerangka kerjasama bilateral, regional maupun multilateral untuk peningkatan kerja sama internasional bidang pertanian dalam rangka peningkatan kerja sama teknik maupun kerja sama perdagangan dan investasi sektor pertanian.
6. Menunjang diplomasi politik melalui pertanian dalam rangka membela Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Menyediakan data dan analisis yang mendukung kegiatan peningkatan kerja sama luar negeri bidang pertanian, menyusun laporan kinerja dan menyiapkan bahan laporan pimpinan yang terkait dengan kerja sama luar negeri bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan audit laporan keuangan dan audit kinerja birokrasi.

3. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terciptanya mutu pelayanan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang efisien dan efektif .
2. Tersusunnya rumusan kebijakan kerja sama luar negeri yang mendukung *Strategi Induk* pembangunan pertanian.
3. Tersusunnya program dan perencanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum kerja sama bilateral, regional dan multilateral.
4. Terwujudnya peran sebagai *leading* diplomasi dan negosiasi bidang pertanian di forum Internasional.
5. Terdiseminasikannya hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang berkesinambungan.
6. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian.
7. Terlaksananya fungsi pelayanan organisasi yang prima.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pusat Kerja Sama Luar Negeri selama Bulan Pebruari 2016, dapat dilaporkan sebagai berikut :

2.1. Bidang Bilateral

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Working Group Meeting and Joint Steering Committee Between Republik Indonesia of Indonesia and The Netherlands in the Field Water, tanggal 22 – 23 Pebruari 2016 di Jakarta.

Rapat Pembahasan dan Koordinasi Dalam Rangka Kerja Sama Bilateral

1. Rapat Kerja Sama Bilateral Indonesia - Fiji di Bidang Pertanian, tanggal 9 Pebruari 2016 di Kementerian Pertanian
2. Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Grand Design Pilot Project Pertanian di Negara Mitra, tanggal 10-11 Pebruari 2016 di Bogor
3. Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Grand Design Pilot Project Pertanian di Negara Mitra, tanggal 15-16 Pebruari 2016 di Bogor
4. Rapat Kerja Sama Bilateral Indonesia - Thailand dan Indonesia – Vietnam, tanggal 17 Pebruari 2016 di Kementerian Pertanian Jakarta.
5. Workshop Review Capaian Kerja sama Bilateral dengan Negara Mitra di kawasan Afrika Timur Tengah, tanggal 22-23 Pebruari 2016 di Bogor
4. Persiapan Pelaksanaan CF-SKR TA 2016 untuk Kegiatan Direktorat Jenderal Hotrikultura, tanggal 26-28 Pebruari 2016 di Mando Sulawesi Utara.
5. Koordinasi Persiapan Kunjungan Tim Teknis Kementan RI ke Hongaria, tanggal 29 Pebruari – 2 Maret 2016 di Balitsereal Maros Sulawesi Selatan.

2.2. Bidang Regional

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Pertemuan Strategic Planning Meeting IMT-GT 2016, tanggal 3-5 Pebruari 2016 di Penang Malaysia.
2. Pertemuan *Governing Council* CAPSA ke-12, tanggal 18-19 Februari 2016 di Bangkok, Thailand
3. *Agribusiness Cluster Strategic Planning Meeting* BIMP EAGA 2016, tanggal 24-26 Pebruari 2016 di Davao, Philippines

Rapat Pembahasan dan Koordinasi Dalam Rangka Kerja Sama Regional

1. Rapat Persiapan SPM BIMP-EAGA 2016, tanggal 12 Pebruari 2016 di Biro KLN Kementan Jakarta
2. Rapat Finalisasi Persiapan *The 12th Session of the Governing Council of the Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture (CAPSA)* yang akan diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada tanggal 19 Februari 2016, tanggal 15 Pebruari 2016 di Biro KLN Kementan Jakarta.
3. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan *The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo, Conference and Business Matching*, tanggal 22-24 Pebruari 2016 di Makasar, Sulawesi Selatan.

Menghadiri Rapat, Seminar, Lokakarya, dan Lain-lain

1. Menghadiri Rapat Konsolidasi Indonesia untuk negara-negara Pasifik (MSG), tanggal 3-5 Pebruari 2016 di Museum KAA, Bandung
2. Menghadiri Press Realease Agreed Export Tonnage Scheme dari ITRC, tanggal 4 Pebruari 2016 di Kementerian Perdagangan.
3. Menghadiri Rapat persiapan pelaksanaan pengiriman tenaga ahli dan training workshop dalam rangka revitalisasi ARFTC, Jenoi, Gambia, tanggal 10 Pebruari 2016 di Kementerian Luar Negeri

4. Menghadiri Rapat Pembentukan Single Agency Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia, tanggal 17 Pebruari 2016 di Hotel Aryaduta Jakarta.
5. Menghadiri Rapat Pertemuan Koordinasi Kerjasama, tanggal 18 Pebruari 2016 di Hotel Izi Bogor
6. Menghadiri Rapat Persiapan “Gertak Birahi” bantuan Inseminasi Buatan untuk Timor Leste tanggal 23 Pebruari 2016 di Kementerian Sekretariat Negara RI.
7. Menghadiri Rapat persiapan Revitalisasi Gambia, tanggal 24 Pebruari 2016 di BBPP Lembang Bandung.

2.3. Bidang Multilateral

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

Rapat Pembahasan dan Koordinasi Dalam Rangka Kerja Sama Multilateral

1. Rapat Tindak Lanjut KTM WTO ke-10, tanggal 28-29 Januari 2016 di BB Biogen, Bogor.
2. Rapat Pembahasan Implementasi Cetak Biru G20, tanggal 12-13 Pebruari 2016 di BB Biogen Bogor
3. Rapat Pembahasan Kerja Sama antara Kementerian Pertanian dan IDH International Trade Initiative, tanggal 16 Pebruari 2016 di Kementerian Pertanian Jakarta.
4. Rapat Pembahasan Posisi Indonesia untuk Sidang Committee on Agriculture (CoA), tanggal 18-20 Pebruari 2016 di Bogor.
5. Rapat Pembahasan Penyusunan Posisi Runding Indonesia untuk Sidang Trade Policy Review)TPR) ke 6 Turki di WTO tanggal 29 Pebruari 2016 di Bogor.

Menghadiri Undangan Rapat, Seminar, Lokakarya dan lain-lain

1. Menghadiri Rapat *Intergovernmental Platform On Biodiversity and Ecosystem Services* (IPBES), tanggal 1 Pebruari 2016 di Kementerian Luar Negeri Jakarta.
2. Menghadiri Rapat Persiapan Sidang CoA, tanggal 15 Pebruari 2016 di Kementerian Perdagangan Jakarta.

2.4 Sub Bagian Tata Usaha dan Atase Pertanian

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

Menghadiri Undangan Rapat, Seminar, Lokakarya dan lain-lain

- 1 Menghadiri Reviuw RKA-KL Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tanggal 12 Januari 2016 di Hotel Lor In Sentul Bogor.
- 2 Menghadiri Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tahun 2016, tanggal 21 Januari 2016 di Ruang Unit Pengadaan Gedung B, Kementerian Pertanian Jakarta
- 3 Menghadiri Pelatihan Penetapan Tarif dan Rules of Origin (ROO), tanggal 9-10 Pebruari 2016 di Cipayung, Bogor.
- 4 Menghadiri Rapat Penyusunan Draft JRA Failitatif, tanggal 10 Pebruari 2016 di Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian Jakarta.
- 5 Menghadiri Pembahasan Perubahan Peraturan Menteri PAN dan RB, tanggal 16 Pebruari 2016 di Pusat Penelitian dan Pengembangan Bogor.
- 6 Menghadiri Sosialisasi PMK 160/PMK.05/ 2016 dan PMK.154/PMK.05/2015 tanggal 24 Pebruari 2016 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta.
- 7 Menghadiri Pertemuan Koordinasi Pemantauan dan Pelaporan Aplikasi MONEV (SMART) Tahun 2015 dan Konfirmasi Laporan MONEV (SMART) Tahun 2016, tanggal 25-26 Pebruari 2016 di Puslitbang Perkebunan Bogor.

- 8 Menghadiri Rapat Inventarisasi dan Pemetaan Kegiatan Revolusi Mental Lingkup Kementerian Pertanian, tanggal 26 Pebruari 2016 di Bogor.
- 9 Menghadiri Rapat Koordinasi Implementasi PMK 160 oleh Satker Atase Teknis di Luar Negeri, tanggal 26 Pebruari 2016 di Kementerian Luar Negeri Jakarta.

Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)

- 10 Penugasan pejabat/pegawai Kementan ke luar negeri sebanyak 71 orang yaitu mengikuti Workshop/seminar sebanyak 7 orang, menghadiri pertemuan/sidang sebanyak 24 orang, mengikuti pelatihan/training sebanyak 33 orang, program S2 sebanyak 1 orang.

LAPORAN BULANAN BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI

PERIODE BULAN FEBRUARI 2016

| NO. | TANGGAL DAN TEMPAT | KEGIATAN | PIHAL YANG TERLIBAT | HASIL KEPUTUSAN | TINDAK LANJUT |
|-----------------------------|--|--|---|---|---|
| KERJA SAMA BILATERAL | | | | | |
| 1 | 1 Februari 2016 Kementerian Luar Negeri | Rapat <i>Intergovernmental Platform On Biodiversity and Ecosystem Services</i> (IPBES) | Kemenlu, Kementerian LH dan Kehutanan, LIPI, IPB dan Kementan | Rapat membahas pengertian IPBES, bagaimana posisinya saat ini dan agenda yang akan dibahas pada saat pelaksanaan sidang yang memerlukan dukungan seluruh Kementerian terkait agar ada pengesahan dan Peraturan Presiden | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kemenlu akan segera mengirimkan Surat Permintaan Delri ke Kementan untuk menghadiri sidang tersebut, serta meminta bahan masukan secara tertulis untuk substansi agenda sidang yang akan dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia. 2. Pihak Kemenlu akan melaksanakan rapat teknis khusus Pollination mengundang seluruh Badan Litbang K/L terkait untuk persiapan sidang 3. Indonesia mencalonkan 2 (dua) orang sebagai anggota Biro IPBES Asia Pasifik, yaitu: Prof. Dedi Darnaedi (LIPI) dan Ratna Kusuma Sari (Kementerian LH dan Kehutanan) |
| 2. | 3 Februari 2016 Kementerian Luar Negeri | Mewakili Menteri Pertanian pada Pembekalan dan pelepasan Duta Besar LBBP RI untuk Negara-negara sahabat dan organisasi Internasional | Menteri Kabinet Kerja, Staf khusus kepresidenan, 33 Dubes LBPP RI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Arahkan Presiden RI yang disampaikan Staf Khusus Kepresidenan Bidang Komunikasi kepada para Duta Besar diantaranya adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian kesepakatan melalui sebuah MoU/treaty adalah sebuah prestasi. Untuk itu perlu ditindaklanjuti secara maksimal tanpa perlu membuat sebuah kesepakatan baru. • Kepentingan nasional berada diatas kepentingan internasional. Untuk itu, para Diplomat harus mengaplikasikan diplomasi yang membumi, yaitu diplomasi yang | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>mengedepankan kepentingan rakyat, bermanfaat dan terkoneksi dengan kebutuhan rakyat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para Duta Besar Indonesia harus mempunyai insting tajam untuk melihat potensi ekonomi yang ada di negara penempatannya karena hampir 90% aktifitas dunia akan fokus pada masalah perekonomian. • Pertumbuhan ekonomi harus bisa diraih sesuai dengan target, melalui <i>foreign direct investment</i> yang berkaitan dengan industri dari industry bersifat konvensional maupun yang <i>high technology</i>. • Memperkuat hubungan kemitraan dan menghindari adanya kenaikan tariff bagi produk atau komoditas Indonesia ke negara mitra seperti yang terjadi pada CPO di Perancis (masih isu). • Mempertahankan isu, Indonesia sebagai ibukota Asean. <p>2. Arahannya Menteri Luar Negeri menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 prioritas politik luar negeri Indonesia (Polugri): melindungi kedaulatan Negara Republik Indonesia; melindungi warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri; meningkatkan diplomasi ekonomi, termasuk diplomasi maritime; dan meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan di dunia internasional. • Penyelesaian draft Bilateral Investment Treaty, akan menjadi perjanjian baru investasi Indonesia dengan negara mitra. Untuk itu Para Diplomat Indonesia secara terus menerus akan diminta untuk menjadi marketers bagi Indonesia. • Akan membentuk "Task Force Diplomasi Ekonomi" yang dikoordinir oleh Wakil | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|
| | | | | <p>Menteri Luar Negeri untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan peluang bisnis, kerja sama pembangunan dan kesepakatan-kesepakatan ekonomi dengan negara lain dapat segera ditindaklanjuti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama strategis dengan 17 negara (USA, Rusia, Belanda, UE, RRC, Jepang, Australia, India, Korea Selatan, Brazil, Vietnam, Afrika Selatan, PNG, Inggris, Jerman, Perancis dan Turki). • Memperkuat kemitraan Strategis dengan Gulf Cooperation Community • Memperkuat tatanan maritim dikawasan Samudera Hindia dalam kapasitas Indonesia sebagai Ketua IORA periode 2015-2017 | |
| 3. | 4 Februari 2016 Kementerian Perdagangan | Rapat persiapan Joint Trade Committee | Kemenlu, Kementerian terkait dan KADIN | <p>1. JTC adalah wadah upaya peningkatan kerjasama perdagangan kedua Negara yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan Mesir</p> <p>2. Pada awalnya Mesir mengusulkan untuk diadakan pada Nopember 2015, namun karena padatnya kegiatan di kemendag disulkan akan diadakan pada Maret tahun 2016.</p> <p>3. Beberapa sector issue yang akan dibicarakan diantaranya ekonomi, perdagangan dan investasi, perindustrian, Pertanian, keuangan dll</p> <p>4. Kementerian perdagangan Indonesia mengharapkan dukungan dari kementerian pertanian untuk memberikan masukan terkait domain kerjasama pertanian dalam upaya peningkatan perdagangan produk pertanian kedua Negara.</p> | Kementan akan mendukung pelaksanaan JTC Indonesia – Mesir. |
| 4. | 4 Pebruari 2016, Bogor | Rapat Pembahasan Penguatan Sinergi Pelaksanaan Misi Ekonomi RI ke Afrika Sub Sahara | Kemlu, Direktur Afrika KemenKUKM, Asisten Deputi Pemasaran, | <p>Hasil dan Kesimpulan disampaikan Langsung oleh Direktur Afrika Bapak Lasro Simbolon :</p> <p>1. Bilateral Bussines Forum (Back to Back dengan</p> | |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|
| | | | Kemendag RI, Direktur Kerja Sana Pengembangan Ekspor Kementan, Biro KLN, Ketua Kadin | SKB/FKB) <ul style="list-style-type: none"> RI – Afsel, RI – Ethiopia, RI – Ghana, RI – Kenya, RI – Mozambik dan RI – Nigeria 2. Partisipasi pada pameran dagang Internasional <ul style="list-style-type: none"> Indonesia Solo Exhibition, 4 – 8 April, Nigeria International Fair of Madagaskar, 19 – 22 Mei 2016, Madagaskar Africa’s Big Seven dan SAITEX (Southern African International Trade Exhibition), 19 – 21 Juni 2016, Afsel Dar Es Salaam International Trade Fair, 28 Juni – 8 Juli 2016, Tanzania Interior Design and Décor Exhibition (Decarex), 5 – 9 Agustus 2016, Afsel | |
| 5. | 9 Pebruari 2016 Kementerian Pertanian | Rapat Kerja Sama Bilateral Indonesia - Fiji di Bidang Pertanian | Biro KLN, Kedutaan Besar Fiji di Jakarta, Kementerian Luar Negeri, Badan Litbang Pertanian, Ditjen PSP, Ditjen Hortikultura, Ditjen Tanaman Pangan, Badan SDM Pertanian | Hasil Pertemuan: <ol style="list-style-type: none"> MoU bidang pertanian Indonesia- Fiji telah habis masa berlakunya tahun 2012 dan kedua belah pihak sepakat untuk memperbarui MoU dimaksud. Pihak Indonesia telah mengirimkan <i>counter draft</i> MoU kepada pihak Fiji melalui Kementerian Luar Negeri, namun sampai saat ini belum ada tanggapan. Indonesia telah membantu pihak Fiji dengan mengirimkan hand traktor dan menunggu <i>feedback</i> dari pihak Fiji mengenai keuntungan bantuan dimaksud. Perwakilan dari Kedutaan Besar Fiji di Jakarta akan berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian Fiji terkait dengan pembaharuan <i>Memorandum of Understanding (MoU) on Agriculture</i>. Pertemuan sepakat untuk melaksanakan <i>Working Group on Agriculture (WGA)</i> ke-1 di Fiji, sekaligus memberikan kesempatan kepada delegasi Kementerian Pertanian RI untuk dapat mengunjungi dan mengevaluasi bantuan alsintan dan teknis yang selama ini | |

| | | | | | |
|----|------------------------------|--|---|--|--|
| | | | | <p>telah diberikan kepada Pemerintah Fiji.</p> <p>5. Terkait dengan <i>request for food processing from Indonesian expert</i>, pada prinsipnya Kementerian Pertanian RI tidak keberatan dan mendukung usulan Fiji dimaksud. Namun demikian, beberapa hal yang perlu klarifikasi lebih lanjut dari pihak Fiji diantaranya mengenai periode penugasan expert Indonesia dan nilai anggaran yang dialokasikan akan segera dikomunikasikan lebih lanjut oleh Kedutaan Besar Fiji dengan Kementerian Pertanian Fiji.</p> <p>6. Pihak Fiji akan segera menyampaikan <i>consultancy agreement</i> yang telah mengakomodir masukan dari pihak Indonesia, sementara Kementan RI akan mengadakan rapat konsolidasi ke dalam untuk dapat merealisasikan rencana kegiatan pengiriman expert dimaksud.</p> | |
| 6. | 10 - 11 Pebruari 2016, Bogor | Dalam Rangka Tindak Lanjut Penyusunan Grand Design Pilot Project Pertanian di Negara Mitra | Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dll | <p>Terdapat beberapa catatan yang disampaikan oleh para narasumber diantaranya adalah:</p> <p>1. Perlu adanya pembatasan ruang lingkup dalam penyusunan Grand design tersebut berupa peruntukkan untuk jangka pendek, menengah dan panjang sehingga dapat berdampak pada pelaksanaan pemberian bantuan.</p> <p>2. Pentingnya penginformasian kekuatan Indonesia berupa identifikasi posisi strategis Indonesia seperti sumber daya dimiliki serta tidak hanya keunggulan di bidang pertanian tapi juga di bidang industri.</p> <p>3. Mengidentifikasi posisi strategis dan kekuatan negara Afrika.</p> <p>4. Perlu adanya informasi mengenai capaian</p> | |

| | | | | kerjasama | |
|----|--|--|---------------------------|---|--|
| 7. | 11 Pebruari 2016 Hotel JW Marriot Jakarta | Mewakili Sekjen menghadiri acara peringatan Independent Day ke-60 Republik Sudan | Menteri Kabinet Kerja dll | <p>1. Sambutan Tarig Abdalla Ali Eltom (Counselor Kedutaan Sudan di Jakarta) Sehubungan ketidak hadiran Dubes Sudan karnea alasan sakit maka sambutan diwakilkan oleh Mr. Tarig.</p> <p>Dalam sambutannya Mr. Tarig menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Indonesia yang selama ini menjadi mitra penting dengan Sudan. Hubungan Indonesia dan Sudan telah terjalin sejak Indonesia belum merdeka atau sekitar tahun 1910-an dimana seorang ulama besar Sudan, Syeikh Ahmed Surkati datang ke Indonesia dan kemudian mendirikan yayasan Al Irsyad yang hingga kini masih eksis berkiprah di dunia pendidikan dan dakwah agama Islam. Hubungan tersebut diperkuat dengan keikutsertaan delegasi Sudan dalam delegasi Mesir pada Konferensi Asia Afrika (April 1955) di Bandung meskipun pada saat itu Sudan masih berjuang untuk mencapai kemerdekaannya dari protektorat Mesir–Inggris. Pemimpin pejuang Sudan, Ismail Al Azhari dan rombongan, oleh Presiden RI Soekarno, kemudian diberi bendera (berupa kain / sapu tangan berwarna putih bertuliskan kata SUDAN), kursi, dan meja sendiri serta terpisah dari delegasi Mesir. Setahun kemudian, 1 Januari 1956, Sudan merdeka dan Al Azhari menjadi Presiden Pertama Sudan</p> <p>2. Sambutan Dr. Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dalam sambutannya Ibu Siti Nurbaya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kemerdekaannya yang ke-60 kepada Sudan. Beliau menyampaikan bahwa Hubungan diplomatik Indonesia dan Sudan pertama</p> | |

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|
| | | | | <p>kalinya terjalin sejak tahun 1960 dengan dibukanya Perwakilan RI di Khartoum pada tingkat Kuasa Usaha. Namun pada tahun 1967 Perwakilan RI tersebut ditutup karena alasan finansial dan selanjutnya dirangkap dari KBRI Cairo tanggal 6 Januari 1996, Pemerintah Indonesia membuka kembali perwakilannya di Khartoum pada tingkat Kedutaan Besar RI dan mengangkat Drs. Andi Sjamsu sebagai Duta Besar RI Pertama di Sudan.</p> <p>Dari tahun ke tahun hubungan kerjasama Indonesia-Sudan meningkat, baik ekonomi, pertanian, social, budaya, politik maupun pendidikan. Dan diharapkan kedepan jalinan kerjasama ini akan terus meningkat dan saling menguntungkan.</p> | |
| 8. | 15 - 16 Pebruari 2016, Bogor | Dalam Rangka Koordinasi Penyusunan Grand Design Pilot Project Pertanian di Negara Mitra | Kemlu Direktur Afrika, Dekan Fakultas IPB, Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | <p>Terdapat beberapa catatan yang disampaikan oleh para narasumber diantaranya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grand design kerjasama bidang pertanian dengan negara Afrika : <ul style="list-style-type: none"> - Menindaklanjuti kerjasama pernah dilakukan sebelumnya - Memperkuat kerjasama Selatan-Selatan khusus dengan Afrika - Perspektif kerjasama bidang pertanian (Indonesia & Afrika) - Definisikan secara ringkas <i>Grand Design</i> kerjasama bidang pertanian dengan negara Afrika adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan kerjasama bidang pertanian untuk kurun waktu 2016-2020 | |
| 9. | 17 Pebruari 2016 Kementerian Pertanian | Rapat Kerja Sama Bilateral Indonesia - Thailand dan Indonesia - Vietnam | Biro KLN, Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Setditjen Hortikultura, Setditjen Perkebunan, Setditjen Tanaman Pangan, | <p>Pembahasan Pertemuan:</p> <p>a. Indonesia - Thailand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direncanakan pertemuan <i>the 7th Joint Agricultural Working Group (JAWG)</i> Indonesia - Thailand, akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Maret 2015 di Thailand. | Biro KLN akan menyampaikan surat resmi kepada instansi terkait mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan tanggapan mengenai implementasi perkembangan kerja sama |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | | | <p>Sekretariat Badan SDM Pertanian, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama bilateral Indonesia – Thailand telah dipayungi oleh <i>Memorandum of Understanding (MoU) on Agricultural Cooperation</i> yang telah ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2005, di Bangkok, Thailand. MoU tersebut telah habis masa berlakunya pada tahun 2015 sehingga diperlukan perbaruan MoU dimaksud. Pihak Indonesia akan mengusulkan agenda pertemuan mengenai perbaruan MoU bidang pertanian. • Dalam rangka mempersiapkan bahan posisi delri untuk pertemuan <i>the 7th Joint Agricultural Working Group (JAWG)</i> Indonesia – Thailand, masing-masing unit eselon 1 teknis terkait diminta untuk menyampaikan perkembangan implementasi proyek yang disepakati pada pertemuan JAWG ke-6 tahun 2013 di Solo, dan usulan kegiatan kerja sama baru. • Berkenaan dengan implementasi kegiatan kerja sama yang selama ini menjadi tanggungjawab Ditjen PPHP, rapat menyarankan agar kegiatan kerja sama tersebut dapat dialihkan ke Ditjen Komoditi terkait. Sebagai contoh, implementasi kegiatan yang berjudul "<i>Study Visit on Durian and Longan Orchard Management and Supply Chain</i>" dan "<i>Comparative Study on Vegetable Supply Chain Management System</i>" dapat dialihkan ke Direktorat Jenderal Hortikultura. <p>b. Indonesia - Vietnam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direncanakan pertemuan <i>the 1st Working Group on Agricultural Commodities</i> Indonesia – Vietnam akan dilaksanakan pada bulan April 2016 di Indonesia. | <p>Indonesia - Thailand yang telah disepakati dalam pertemuan JAWG sebelumnya.</p> <p>2. Permintaan usulan kerja sama Indonesia - Vietnam. Permintaan delri pada pertemuan JAWG ke-7 Indonesia - Thailand.</p> |
|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | |
|-----|------------------------------|--|--|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama bilateral di bidang pertanian Indonesia – Vietnam dipayungi oleh <i>Memorandum of Understanding (MoU) on Agricultural Commodities Cooperation</i> yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta. Area komoditas yang tercantum dalam MoU yaitu komoditas lada, padi hibrida, kopi, dan buah naga, serta komoditas lainnya yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. • Selanjutnya dalam rangka mempersiapkan bahan posisi delri untuk <i>the 1st Working Group</i> dengan Vietnam, masing-masing unit eselon 1 teknis diminta untuk dapat mengidentifikasi area kerja sama konkrit yang menjadi kepentingan Indonesia. | |
| 10. | 22 - 23 Februari 2016, Bogor | Dalam Rangka Workshop Review Capaian Kerja sama Bilateral dengan Negara Mitra di kawasan Afrika Timur Tengah | Sekretaris Ditjen. Tanaman Pangan, Sekretaris Ditjen Hortikultura, Sekretaris Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan Direktur Afrika, Direktur Timur Tengah, Direktur Kerja Sama Teknik Kementerian Luar Negeri | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Agriculture and livestock production</i> <ul style="list-style-type: none"> - Mengendalikan dan memberantas penyakit hewan penting antar kedua negara. - Pengembangan laboratorium pengetesan vaksin - Kerjasama dalam Control and Eradication of HPAI 2. <i>Agricultural research and technology development</i> <ul style="list-style-type: none"> - Joint research dan Sharing experience penanganan ternak baik budidaya maupun berbagai penyakit. - Mengadakan pertemuan teknis secara teratur untuk lebih meningkatkan keterlibatan kalangan peneliti sosial, ekonomi dan kebijakan dalam menselaraskan pengelolaan plasma nufptah untuk kepentingan nasional dengan kepentingan internasional. 3. <i>Technical cooperation and capacity building</i> <ul style="list-style-type: none"> - Menawarkan beberapa pelatihan bidang food safety dan karantina Pelatihan di | |

| | | | | | |
|-----|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | | <p>Indonesia Akomodasi, konsumsi dan transport local ditanggung Indonesia, sedangkan tiket pesawat udara dan lumpsum peserta ditanggung Namibia adapun bila Pelatihan di adakan di Namibia, Indonesia menanggung biaya pengiriman expert, akomodasi, konsumsi, lumpsum dan transport local ditanggung Namibia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Magang Petani Padi Namibia di Indonesia - Biaya tiket pesawat udara PP dan lumpsum ditanggung Namibia sedangkan Indonesia menanggung akomodasi, konsumsi dan transport lokal | |
| 11. | 22-23 Pebruari 2016, Jakarta | <i>Working Group Meeting and Joint Steering Committee between Republic of Indonesia and the Netherlands in the Field Water.</i> | Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian dan Biro KLN-Kementan | <p><i>Working Group Meeting and Joint Steering Committee</i> Indonesia – Belanda dilaksanakan pada tanggal 22-23 Pebruari 2016 di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Adapun hasil pertemuan tersebut sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja Sama Indonesia – Belanda bidang keairan didasari oleh MOU yang ditandatangani antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Kerajaan Belanda pada tanggal 14 April 2015 di Korea Selatan. Untuk memaksimalkan kesepakatan dalam MOU, kedua pihak melakukan pertemuan bilateral Indonesia – Belanda pada 22-23 Pebruari 2016; 2. Pada pelaksanaan pertemuan bilateral dimaksud, Kementerian PUPR bertindak selaku Ketua Delri dan anggota Delri terdiri dari beberapa K/L terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan dan Provinsi DKI Jakarta. Adapun rangkaian | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>pertemuan bilateral Indonesia – Belanda yaitu <i>Working Group (WG)</i>, tanggal 22 Pebruari 2016 dan <i>Joint Steering Committee Meeting (JSG)</i> Indonesia – Belanda, tanggal 23 Pebruari 2016.</p> <p>Working Group Meeting</p> <p>3. Pertemuan WG Indonesia – Belanda terbagi menjadi 3 (tiga) WG yaitu: a) WG I - <i>Water Management</i>, b) WG II - <i>Water for Food and Ecosystem</i>, dan c) WG III - <i>Water Supply and Sanitation</i>. Isu pertanian dibahas pada pertemuan WG II, yang mana Kementerian Pertanian RI menjadi anggota WG. Pada pertemuan WG II telah disepakati beberapa usulan kerja sama sebagai berikut:</p> <p>i. Project Digests: Selected</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lowland development and Rehabilitation to reserve National's Food Security 2. Knowledge Map on Lowlands Peatland Indonesia <p>ii. Project Disgests: Further elaboration required</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vulnerability Assessment between and Adaption Strategy to Climate Change Impact in Lake Toba Area 2. Acting Plan of Sustainable Regional Development Cooperation Strategy Regarding, Energy, Water and Food in Implementing Integrated Sustainable Regional Development through Strategic Development Region 3. New: Safeguard and Promoting Sustainable Development of Highly Productive Land for Food Security <p>iii. Project Digests: Not selected</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sustainable Development in Highly Productive Land for Food Security. 2. Seluruh hasil kesepakatan pada WG dilaporkan oleh masing-masing Co- | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Chair WG pada pertemuan <i>Joint Steering Committee</i> Indonesia-Belanda.</p> <p>Joint Steering Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan <i>Joint Steering Committee</i> RI – Belanda dipimpin oleh Bapak Taufik Widjoyono, Sekjen Kementerian PUPR, dan dampingi oleh Ms. Lidewijde Ongering. Pertemuan JSC berlangsung dengan suasana yang saling mendukung dan membahas beberapa perkembangan kerja sama yang telah dilaksanakan, kendala yang dihadapi dan rencana-rencana kerja sama kedua negara kedepannya; 2. Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian menyampaikan beberapa usulan kerja sama sektor pertanian yang dapat dikaitkan dengan usulan kerja sama dari Kementerian/Lembaga lainnya sehingga menjadi usulan kerja sama secara holistik dari Indonesia. Adapun usulan kerja sama tersebut yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) <i>food security</i> yang didukung dengan penerapan <i>Good Agricultural Practices (GAP)</i> untuk komoditi hortikultura dan tanaman pangan b) <i>water efficiency</i> dalam peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura 3. Menanggapi usulan dari Kementan dimaksud, pihak Belanda menyampaikan akan mempertimbangkan usulan kerja sama tersebut untuk dapat diakomodasi pada pertemuan WG berikutnya yang akan diadakan di Belanda. 4. Setelah rangkaian acara selesai, | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|--|
| | | | | <p>pertemuan JSM RI-Belanda ditutup dengan penandatanganan Minutes of Meeting antara Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Wakil dari Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Sekretaris Jenderal Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Kerjaan Belanda;</p> | |
| 12. | 25 Februari 2016, Bogor | Dalam rangka menghadiri pertemuan lanjutan penyusunan posisi Indonesia pada perundingan IA CEPA | <p>Biro KLN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat dipimpin oleh Direktur Kerja Sama Bilateral Djatmiko Bris Witjaksono dan Ketua Tim Perunding IA – CEPA untuk Indonesia dan dihadiri oleh wakil dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Pimpinan rapat menginformasikan bahwa rapat bertujuan untuk mereaktivasi kembali jalannya perundingan IA – CEPA Indonesia – Australia. Pada tanggal 9 Februari 2016 telah dilaksanakan rapat di Kantor Wakil Presiden RI. pada saat rapat tersebut Bapak Wakil Presiden RI mengingatkan kembali untuk memperkuat posisi runding agar pada saat perundingan nanti Indonesia memiliki posisi yang kuat dan jelas. Selain itu pimpinan rapat juga menjelaskan bahwa Bapak Presiden RI ingin agar sektor jasa juga menjadi perhatian karena masih banyak | |

| | | | | | |
|-----|---|---|----------------------------|--|--|
| | | | | <p>peluang dari sektor ini yang dapat ditawarkan kepada pihak Australia.</p> <p>3. Ketua Tim Perunding IA – CEPA Bapak Deddy Saleh untuk Indonesia menjelaskan bahwa kerja sama yang perlu dirundingkan kembali adalah kerja sama yang benar – benar baru. Selain itu beliau menjelaskan bahwa walaupun tariff produk tertentu sudah Nol namun tetap perlu diwaspadai hambatan – hambatan yang ada di pihak Australia seperti dari segi kemasan, pelabelan, maupun SPS.</p> <p>4. Pimpinan rapat juga menjelaskan bahwa peran SPS juga sangat penting dalam perundingan IA – CEPA. Sektor terkait harus mengidentifikasi produk – produk unggulan RI apa saja yang miah ada hambatan terkait SPS di pihak Australia. Wakil dari Badan Karantina Pertanian menyampaikan bahwa saat ii produk manggis RI telah berhasil masuk ke pasar Australia. Sedangkan produk mangga kita masih tertahan karena terdapat temuan lalat buah. Namun pihak Australia mendukung penuh perlakuan yang diberikan Karantina RI dan tidak mempermasalahkan metode apa yang digunakan untuk membasmi lalat buah tersebut.</p> <p>5. Pimpinan rapat menjelaskan bahwa ada permintaan dari pihak Australia agar RI menurunkan tariff gula. Pihak Australia meminta penjelasan berapa % RI akan menurunkan tariff tersebut dan sampai jangka waktu berapa lama.</p> | |
| 14. | 26 Februari 2016 Hotel Raffles Jakarta | Mewakili Menteri Pertanian menghadiri acara peringatan National day the State of Kuwait | Menteri Kabinet Kerja, dll | <p>1. Perwakilan dari Indonesia disampaikan oleh Kementerian ESDM Soedirman Said (diwakili oleh utusannya)</p> <p>2. Duta Besar Kuwait untuk Indonesia, Naser Bareh Shahir El Enezi, mengatakan bahwa saat ini negaranya membutuhkan banyak</p> | |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>tenaga kerja formal asal RI untuk bekerja di sana.</p> <p>3. Hal itu disampaikan Naser, ketika ditemui di peringatan 54 tahun Hari Nasional dan Pembebasan Kuwait di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu 25 Februari 2015. Selain di Bidang Kesehatan, Kuwait juga banyak membutuhkan tenaga formal di bidang minyak dan gas.</p> | |
| 15. | 26 - 28 Februari 2016, Manado - Sulawesi Utara | Persiapan Pelaksanaan CF-SKR TA 2016 untuk Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura | Biro KLN, Ditjen Hortikultura, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, dan Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Tomohon, Sulawesi Utara | <p>1. Kegiatan yang didanai oleh program pemanfaatan dana CF-SKR TA 2016, salah satunya adalah kegiatan yang merupakan usulan Ditjen Hortikultura dengan judul kegiatan yaitu "<i>Sustainable Horticulture Development in The Highland Area</i>".</p> <p>2. Propinsi Sulawesi Utara khususnya Kota Tomohon adalah salah satu kota penerima bantuan pemanfaatan dana CF-SKR untuk kegiatan "<i>Recovery of Infrastructure Facilities for Improving Cut Flower and Potted Plant Production and Quality in area of Lokon Mountain Eruption Impact</i>".</p> <p>3. Terdapat 40 kelompok Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) yang akan dipilih menjadi 20 kelompok penerima bantuan dengan luas tanah seluruhnya 10 ribu m². Pemilihan ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Utara. Direncanakan akan dibangun sebanyak 20 <i>Green House</i> dengan luas 20 x 25 m untuk masing-masing kelompok penerima bantuan.</p> <p>4. Implementasi kegiatan ini dilakukan selama 1 tahun dengan dana 2,5 milyar rupiah termasuk monitoring, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi bunga potong krisan, serta meningkatkan nilai</p> | Biro KLN akan melakukan koordinasi dengan Ditjen Hortikultura, Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pertanian Kota Tomohon, terkait dengan penentuan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), serta <i>design</i> dari <i>green house</i> yang akan digunakan untuk mengembangkan bunga potong krisan. |

| | | | | | |
|----|--|--|-------------------------------------|--|--|
| | | | | <p>tambah dalam pemasaran pasokan bunga potong krisan.</p> <p>5. Adapun lokasi yang dikunjungi terdiri dari beberapa Kelompok tani (Poktan), yaitu Poktan Matuari, Poktan Baramaji, Poktan Sahabat Tani, Poktan Lewu, Poktan Tanaman Hias Krisan Indah, Poktan Krekleli, dan Poktan Tomou Tou.</p> <p>6. Kelompok – kelompok tani tersebut merupakan kelompok tani yang memproduksi bunga potong krisan. Rata-rata jumlah bunga potong krisan yang dihasilkan sebanyak 15 ribu s.d. 25 ribu potong dalam satu <i>green house</i> dan dijual dengan harga 3000 – 3500 per tangkai untuk grade A. Kelompok tani ini menjual produknya dengan cara pembeli langsung mendatangi kelompok tani itu sendiri. Rata-rata dalam satu tahun setiap kelompok tani menanam dan panen bunga potong krisan sebanyak 3 kali. Adapun jumlah yang harus mereka keluarkan dalam membuat 1 (satu) <i>green house</i> sebesar Rp. 40 juta dengan ukuran 10 x 25 m² dengan menggunakan kayu.</p> | |
| 16 | 29 Pebruari – 2 Maret 2016, Balitsereal Maros, Sulawesi Selatan. | Koordinasi Persiapan Kunjungan Tim Teknis Kementan RI ke Hongaria. | 1. Biro KLN 2. Balitsereal Maros | <p>Adapun hasil kunjungan koordinasi ke Balitsereal yaitu:</p> <p>1. Teridentifikasinya potensi kerja sama di Balitsereal yang dapat diusulkan kepada pihak Hongaria. Potensi kerja sama tersebut yaitu peningkatan produksi gandum di Malino, Sulawesi Selatan, peningkatan produksi komoditi jagung di Jeneponto Sulawesi Selatan, pemanfaatan nilai tambah komoditi sereal seperti sorgum menjadi etanol, kue basah, dan silase;</p> | Potensi yang dimiliki Balitsereal dapat dijadikan posisi Kementan dalam menawarkan kerja sama dengan pihak Hongaria. |

| | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|--|
| | | | | 2. Pemantapan Sulawesi Selatan sebagai sentra produksi jagung dapat dijadikan sebagai posisi tawar kepada pihak Hongaria dalam untuk memberikan investasinya, baik dalam bentuk pembukaan lahan, pengolahan hasil produksi jagung dan pemberian nilai tambah pada produk jagung. | |
| KERJA SAMA REGIONAL | | | | | |
| 1. | 3-5 Pebruari 2016 Museum KAA, Bandung | Rapat Konsolidasi Indonesia untuk negara-negara Pasifik (MSG) | Kementerian Luar negeri, Kementerian Hukum dan HAM, POLRI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pertanian, Badan Intelegent Negara | Inti dari pertemuan ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai potensi kerja sama <i>feasible</i> untuk dikembangkan dalam rencana aksi diplomasi Indonesia dalam organisasi-organisasi sub-regional Pasifik Selatan | 1. Dit. Aspasaf akan menindaklanjuti masukan-masukan terkait bantuan yang akan diberikan kepada negara-negara Pasifik. 2. Dit Aspasaf akan bersurat kepada Kementerian Pertanian terkait permintaan TOR dan Gi untuk kedua pelatihan yang direncanakan tahun 2016. |
| 2. | 3-5 Pebruari 2016, Penang, Malaysia | Pertemuan Strategic Planning Meeting IMT-GT 2016 | Pertemuan dihadiri oleh Delegasi Malaysia, Thailand, CIMT, ADB, JBC, dan anggota Delri terdiri dari unsur-unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (selaku Sekretariat Nasional), Kemenlu, Kemenpar, Kemendag Perdagangan, Kemenhub, Badan Investasi dan Promosi Propinsi Aceh, BAPPEDA Propinsi Sumatera Selatan, Kemeterian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian (Biro KLN, Badan Karantina Pertanian). | 1. Pertemuan <i>break-out session</i> WGAAE yang dipimpin oleh seorang fasilitator yang merupakan konsultan CIMT, membahas tujuan dan strategi <i>Working Group on Agriculture, Agro-based Industry and Environment</i> yang akan dimasukkan kedalam IB 2017-2021. 2. Tujuan utama yang ingin dicapai WGAAE melalui melalui IB 2017-2021 adalah peningkatan produksi primer dan adanya nilai tambah hasil pertanian secara berkelanjutan yang 27esponsive terhadap permintaan pasar, melalui alur bebas produk pertanian guna memfasilitasi perdagangan global baik dalam lingkup IMT (regional) maupun global. 3. Melalui pencapaian tujuan utama yang ditargetkan, diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap sektor pertanian seperti; i) Meningkatnya produksi pertanian yang memiliki | 1. IMT – GT diharapkan dapat mengadopsi standar lingkungan pertanian yang telah ditetapkan ASEAN, serta mempromosikan keuntungan standarisasi tersebut kepada sektor swasta dan pemerintah 2. Keikutsertaan pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam kegiatan IMT-GT khususnya WGAAE, perlu lebih ditingkatkan lagi. 3. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Biro KLN Kementerian Pertanian yaitu, memastikan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat terkait kelanjutan proyek <i>IMT-GT Network for Animal Production</i> |

| | | | | | |
|----|--|---|-----------------------------------|---|--|
| | | | | <p>nilai tambah melalui transfer teknologi didukung oleh 28esponsi , akademisi , dan pemerintah; ii) Sektor Pertanian diharapkan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; iii) Produksi hasil pertanian yang 28esponsive terhadap permintaan pasar; iv) Memfasilitasi arus bebas produk pertanian lingkup regional (IMT – GT) dan global yang didukung oleh harmonisasi standar produk dan regulasi perdagangan.</p> <p>4. Guna menunjang pencapaian tujuan utama yang telah ditetapkan, masing-masing negara anggota IMT-GT perlu diselenggarakan kegiatan-kegiatan seperti <i>conference / workshop</i> agar terjadi pertukaran informasi dan teknologi pertanian, serta menyelaraskan kebijakan yang ditetapkan masing-masing negara yang mungkin sampai saat ini masih menjadi kendala dalam kerjasama ini.</p> <p>5. Pada pertemuan ini disepakati beberapa proyek yang akan dihapus dari <i>project list</i>, yaitu; <i>Malaysia Agriculture Horticulture and Argo Tourism</i> (MAHA) dan <i>Malaysia International Seafood Exposition</i> (MISE) 2016, dikarenakan kedua proyek dimaksud bukan termasuk proyek khusus IMT-GT, melainkan kegiatan pameran internasional yang mengundang/ melibatkan lebih dari 100 negara, Indonesia dan Thailand termasuk didalamnya.</p> | <p><i>and Biotechnology – Development of Livestock and Beef Cattle dan Investment on Tuna Fish in West Sumatera</i> yang ada dalam <i>rolling pipeline</i>, serta usulan proyek magang petani muda ke Thailand oleh Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu.</p> |
| 3. | 4 Pebruari 2016 Kementerian Perdagangan | Press Realease Agreed Export Tonnage Scheme dari ITRC | Kementerian Perdagangan, GAPKINDO | <p>1. Para Menteri negara anggota ITRC (Indonesia, Thailand, Malaysia) sepakat membatasi ekspor karet alam melalui skema AETS mulai 1 Maret 2016-31 Agustus 2016.</p> <p>2. Thailand, Indonesia dan Malaysia sepakat meningkatkan konsumsi domestik karet alam untuk pembangunan jalan, bantalan rel dan lain-lain.</p> | - |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|
| | | | | 3. Implementasi AETS akan diawasi oleh ITRC monitoring Committee. | |
| 4. | 10 Pebruari 2016 Kementerian Luar Negeri | Rapat persiapan pelaksanaan pengiriman tenaga ahli dan training workshop dalam rangka revitalisasi ARFTC, Jenoi, Gambia | Kemlu, Biro KLN, Pusat Pelatihan Pertanian, BBPP Lembang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemlu akan melaksanakan pelatihan di Gambia dan dilanjutkan dengan pelatihan di Lembang. 2. Kemtan akan mengirimkan 4 orang tenaga ahli sesuai bidang keahlian yang diperlukan Gambia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian akan menyiapkan General Information dan TOR untuk dikirimkan kepada Kemlu dalam waktu dekat. 2. Kemlu akan mengirimkan GI untuk proses pencarian peserta. |
| 5. | 12 Pebruari 2016, Biro KLN, Kementan | Rapat Persiapan SPM BIMP-EAGA 2016 | Perwakilan dari Sekretariat Nasional/ Bidang Kerjasama Ekonomi Sub Regional, Kemenko Perekonomian; Sekretariat Daerah BIMP-EAGA Propinsi Sulawesi Utara, BPPMD Propinsi Kalimantan Utara, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan; Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perternakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perwakilan dari BPPMD propinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh tahun lalu, di propinsi Kaltim terdapat 2 lokasi proyek benih padi hibrida antara PT. SHS dan Filipina, yaitu di Kabupaten Berau dengan luas 1200 hadan di Panajang Pasir Utara selua 12.000 ha. Untuk perkembangan terkini, diharapkan PT. SHS dapat memberi informasi terkait perkembangan proyek dimaksud yang berada di propinsi Kalimantan Timur. 2. <i>Usulan proposal "Integrated Coconut Production of Small-scale Farmers in BIMP-EAGA"</i> merupakan usulan Propinsi Sulawesi Utara yang disampaikan dan disepakati pada SOM BIMP-EAGA-China pada bulan Desember 2015. Proposal Pemberdayaan Petani Kecil dalam Proses pengolahan kelapa di Indonesia, akan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara sebagai pilot project dan nantinya akan dilaksanakan pula di beberapa provinsi yang mempunyai potensi yang sama. Perwakilan dari BAPPEDA propinsi Sulawesi Utara akan hadir untuk mempresentasikan usulan proyek ini. 3. Terkait dengan rencana pelaksanaan BIMP-EAGA dan IMT-GT <i>Trade Expo</i> ke-3, yang akan | Biro Kerja Sama Luar Negeri menunggu masukan tertulis terkait perkembangan proyek kerjasama yang ada, serta usulan delri yang akan ikut hadir dalam pertemuan dimaksud |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | <p>dilaksanakan pada tanggal 14-16 Oktober 2016 di Makassar, Sulawesi Selatan, tema yang akan diangkat adalah “<i>Strengthening the ASEAN Maritime Economic Corridor and Food Basket</i>”.</p> <p>4. Disampaikan oleh pimpinan rapat, bahwa setiap K/L diharapkan mulai menginformasikan pihak terkait, baik pelaku usaha maupun asosiasi yang berada dibawah naungannya terkait rencana pelaksanaan BIMP-EAGA dan IMT-GT <i>Trade Expo</i> ke-3. Adapun Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian sudah menyiapkan dana dukungan untuk berpartisipasi pada kegiatan dimaksud.</p> | |
| 6. | 15 Pebruari 2016, Biro KLN, Kementan | Rapat Finalisasi Persiapan <i>The 12th Session of the Governing Council of the Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture (CAPSA)</i> yang akan diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada tanggal 19 Februari 2016 | Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri (Setdijen Multilateral, Dit. PELH) Kementerian Pertanian (Sekretariat Badan Litbang, Pusat Litbang Tanaman Pangan, PSEKP, Biro Perencanaan). | <p>1. Indonesia berkeberatan terhadap rencana penambahan kontribusi kepada UNCAPSA sebesar 1,5 – 5 juta USD. Dikarenakan saat ini Indonesia telah memberikan kontribusi yang jumlahnya jauh lebih tinggi dari negara anggota GC lainnya, serta penambahan kontribusi tidak akan berarti tanpa pemenuhan komitmen dari negara anggota lainnya;</p> <p>2. KBRI Bangkok telah membuat kajian tentang analisa <i>cost and benefit</i>. Dimana, KBRI berupaya mengidentifikasi manfaat dan keuntungan apa saja yang telah diperoleh Indonesia sebagai anggota CAPSA sekaligus host CAPSA;</p> <p>3. Dr. Handewi P. Saliem, selaku Kepala PSEKP, Badan Litbang Pertanian, (Ketua Delri pada pertemuan GC CAPSA ke-12), berpendapat bahwa selama ini program-program CAPSA lebih bersifat <i>intangibile</i>, seperti pelatihan. Sejak CGPRT (<i>Regional Coordination Centre for Research and Development of Coarse Grains, Pulses, Roots and Tuber Crops in the Humid Tropics of Asia and the Pacific</i>) Berubah menjadi CAPSA, misi dan tujuan awal kurang</p> | <p>1. Biro KLN menunggu masukan dan posisi dari Badan Litbang Kementerian Pertanian dan Kementerian Luar Negeri;</p> <p>2. Menghadiri Sidang GC CAPSA ke-12, tanggal 18-19 Februari 2016 di Bangkok, Thailand</p> |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| | | | | <p>relevan dengan isu pertanian;</p> <p>4. Menurut perwakilan dari Setditjen Multilateral Kementerian Luar Negeri, sebenarnya manfaat yang diperoleh negara-negara anggota berbeda dengan manfaat yang diperoleh <i>host country</i>. Dengan demikian, Indonesia hendaknya mengoptimalkan program-program CAPSA. Ditambahkan oleh Dit. PELH, Kementerian Luar Negeri, bahwa tidak ada peraturan/ketentuan yang baku yang menyatakan bahwa kontribusi <i>host country</i> harus lebih besar dari negara</p> | |
| 7. | 17 Pebruari 2016, Hotel Aryaduta Jakarta | Rapat Pembentukan Single Agency Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia | Kemsetneg, Kemlu, GIZ, Bappenas, Kemkeu, K/L teknis termasuk Kemtan, beberapa Universitas Negeri di Indonesia | <p>1. Pihak Kornas KSST menyampaikan rencana mengenai pembentukan <i>single agency</i> dalam rangka pelaksanaan program Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia</p> <p>2. GIZ merupakan mitra Indonesia dalam mempersiapkan Academic Paper on Establishment of Single Agency.</p> <p>3. Secara umum K/L mendukung rencana pembentukan Single Agency</p> | K/L yang telah melakukan kajian terkait hal-hal yang menjadi concern Single Agency diharapkan dapat menshare informasinya kepada Kemsetneg atau GIZ sebagai pelaksana kajian. |
| 8. | 18 Pebruari 2016, Hotel Izi Bogor | Rapat Pertemuan Koordinasi Kerjasama | BPPSDMP, Pusat Pelatihan Pertanian, BBPP Batu, BBPP Ketindan, BBPP Batangkaluku, PPMKP Ciawi, BBPP Jambi, BBPP Lampung, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri | Pertemuan bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja kerjasama penyelenggaraan diklat di UPT Pelatihan Pusat terutama terkait dengan dukungan terhadap program-program lingkup Kementerian Pertanian. | <p>1. Biro KLN diharapkan dapat menyampaikan surat terkait permintaan tenaga ahli untuk Revitalisasi Gambia.</p> <p>2. Pusat Pelatihan Pertanian akan menyiapkan Laporan-laporan kegiatan KSST yang sudah dilaksanakan untuk disampaikan ke Biro KLN sebagai laporan ke Tim Kornas KSST.</p> |
| 9. | 18-19 Februari 2016, Bangkok, Thailand | Pertemuan <i>Governing Council</i> CAPSA ke-12, tanggal 18-19 Februari 2016 di Bangkok, Thailand | Susunan Delri: Kepala Pusat PSEKP Kementerian Pertanian (Ketua Delri) | 1. Negara anggota GC CAPSA sepakat untuk tetap mendukung dan mempertahankan CAPSA; | 1. Kementerian Pertanian c.q Badan Litbang Pertanian, akan menganalisa cost and benefit CAPSA bagi Indonesia; |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|--|--|
| | | | -perwakilan Sekretariat Ditjen Multilateral Kemlu, Biro KLN Kementan, Sekretariat Badan Litbang Kementan, dan KBRI Bangkok | 2. Indonesia sebagai host country mengusulkan tenaga ahli professional untuk duduk dalam tim manajemen CAPSA; 3. Dalam rangka mendukung kondisi finansial CAPSA, Negara anggota GC CAPSA diminta untuk meningkatkan kontribusi baik melalui pledge maupun in-kind serta bantuan program untuk tahun 2016 dan 2017 | 2. Seluruh hasil dan keputusan pada GC CAPSA ke-12 akan dilaporkan pada Sidang Komisi UNESCAP ke-72 pada tanggal 15-19 Mei 2016 |
| 10. | 23 Pebruari 2016, Kementerian Sekretariat Negara | Rapat Persiapan "Gertak Birahi" bantuan Inseminasi Buatan untuk Timor Leste | Kementerian Luar Negeri, Bappenas, Biro KLN, PKH, BBIB Singosari; Kementerian Pertanian | Dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia bagi pembangunan kapasitas SDM Timor Leste dalam bidang Inseminasi Buatan untuk Timor Leste, dibahas mengenai persiapan teknis dan administrative pelaksanaan program peningkatan kapasitas bidang inseminasi buatan. Direncanakan pengiriman tenaga ahli Indonesia IB akan berangkat tanggal 13 Maret 2016. | 1. Kementerian Sekretariat Negara akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Bagian keuangan Setneg untuk prosedur penyediaan alat IB yang akan dibeli. 2. BBIB Singosari mengharapkan semua alat yang dibutuhkan dapat sampai di BBIB Singosari pada tanggal 1 Maret 2016. 3. Biro KLN dan PKH akan mem-follow up semua perkembangan terkait persiapan pengiriman TA. |
| 11. | 22-24 Pebruari 2016, Makassar, Sulsel | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan <i>The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo, Conference and Business Matching</i> | Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri, Setda Propinsi Sulawesi Selatan, Kepala Sub Bagian Kerjasama Bilateral, Setda Propinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bagian PPHP, Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan | 1. Kabag Kerjasama Luar Negeri menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sudah menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan <i>The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo, Conference and Business Matching</i> , yaitu di Four Point- Sheraton Hotel Makassar pada tanggal 14-16 Oktober 2016 2. Pemda Sulsel sudah menginformasikan kepada seluruh SKPD dan pihak swasta terkait yang ada di propinsi Sulawesi Selatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud. Partisipasi seluruh SKPD akan dibiayai oleh APBD. | 1. Biro KLN perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan seluruh SKPD lingkup pertanian yang berada di seluruh wilayah BIMP-EAGA dan IMT-GT terkait persiapan mereka dalam berpartisipasi dalam <i>The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo, Conference and Business Matching</i> . 2. Biro KLN perlu menetapkan komponen-komponen pembiayaan yang akan ditanggung dan dibiayai dengan |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|---|--|
| | | | | <p>3. Berkenaan dengan susunan rangkaian acara, Pemprop Sulawesi Selatan akan menyelenggarakan 2 (dua) kali <i>dinner</i> yang akan dilaksanakan pada hari pertama dan hari terakhir kegiatan, yang masing-masing akan dihadiri oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Tuan Rumah (disusuaikan agenda Gubernur)</p> <p>4. Terkait dengan komoditi pertanian, Kabag PPHP menyampaikan bahwa Propinsi Sulawesi Selatan memiliki cukup banyak komoditi unggulan yang layak dan perlu diikutsertakan dalam <i>trade expo</i>. Diantaranya adalah; Jagung, Padi Organik, Markisa Segar, Sirup Markisa, dan Bunga Krisan, yang saat ini sudah berhasil menembus pasar internasional.</p> <p>5. Saat ini, Sulawesi Selatan sedang berkonsentrasi pada produksi hasil pertanian yang memiliki nilai tambah, guna meningkatkan nilai jual dan daya saing hasil pertanian. Adapun kendala yang dihadapi saat ini adalah masalah pengemasan dan desain kemasan, yang berstandar internasional dan memiliki daya tarik sehingga dapat bersaing dengan produk sejenis lainnya</p> | <p>anggaran yang dimiliki dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud.</p> |
| 12 | 24 Pebruari 2016, BBPP Lembang, Bandung | Rapat persiapan Revitalisasi Gambia | Ditjen KST Kemlu, Biro KLN Kementerian Pertanian | <p>1. Pelatihan akan dilaksanakan tanggal 20-29 Maret 2016 di Gambia dan dilanjutkan di BBPP Lembang setelah pelatihan tersebut.</p> <p>2. TOR akan disampaikan kepada Kemlu sebagai bahan diskusi KBRI dalam rangka rapat persiapan di Kemtan Gambia.</p> | BBPP Lembang akan berkoordinasi dengan Kemlu selaku penyelenggara dan Biro KL |
| 13. | 24-26 Februari 2016, Davao Filipina | <i>Agribusiness Cluster Strategic Planning Meeting</i> BIMP EAGA 2016, Davao, Philippines | Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian | <p>1. <i>Agribusiness cluster</i> dipimpin oleh Hajah Suria Zanuddin dari Brunei Darussalam dan dihadiri oleh 34 delegasi yang berasal dari negara BIMP yang terdiri dari Brunei Darussalam, Indonesia,</p> | <p>1. Kementan diharapkan dapat memberikan detail informasi terkait penyelenggaraan rangkaian pertemuan The 3rd</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Malaysia, Filipina, BIMP EAGA <i>Business Council</i> (BEBC), BIMP EAGA <i>Facilitation Centre</i> (BIMP FC), ADB, dan <i>private sector</i>.</p> <p>2. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Bagian Regional, Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian, Dr. Harjito dengan anggota DELRI terdiri dari perwakilan Biro KLN Kementan serta Bapedda Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.</p> <p>3. Terdapat tiga agenda penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yaitu : (1) <i>Working Groups Meeting on Unfinished Business of the Implementation Blueprint</i>, (2) BEV 2025 GOS (<i>Goals, Objectives, and Strategies</i>), <i>Future Strategic Directions</i>, (3) <i>Project Ideation</i>.</p> <p>4. Beberapa hal yang dibahas dan ditindaklanjuti menyangkut kepentingan Indonesia dalam forum tersebut antara lain :</p> <p>I. <i>Working Groups Meeting on Unfinished Business of the Implementation Blueprint</i></p> <p>a. <i>JV on Hybrid Rice Seeds Production</i>. - Perwakilan Indonesia menyampaikan perkembangan terkait kegiatan realisasi distribusi benih padi hibrida yang masih sama dengan tahun 2014 yaitu sebesar 117.237 ha (144%) dari target sebesar 81.000 ha. Sementara itu, target realisasi ekspor di tahun 2016 sebesar 1000 ton dan 2017 mencapai 2000 ton. Menindaklanjuti hal tersebut, Indonesia akan segera mengirimkan update data terkait realisasi distribusi benih tahun 2015 setelah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan PT Sang Hyang Seri (SHS) selaku pelaksana kegiatan.</p> | <p>BIMP EAGA dan IMT GT <i>Trade Expo, Business Conference dan Business Matching</i> khususnya mengenai persyaratan CIQS terkait logistik pengiriman komoditas dari negara anggota BIMP yang akan dipamerkan pada acara tersebut.</p> <p>2. Pada pertemuan berikutnya agar dijajagi kemungkinan untuk berdiskusi dengan <i>cluster</i> transportasi terkait kemungkinan dibukanya rute penerbangan atau penyebrangan khususnya dalam rangka menghadiri <i>Trade Expo</i>.</p> <p>3. Batas terakhir pengumpulan proposal kegiatan 2017-2025 agar disampaikan kepada sekretariat masing-masing cluster pada akhir bulan Juni 2016 dengan menggunakan format template yang akan dikirimkan sekretariat BIMP EAGA.</p> <p>4. Biro KLN Kementan perlu segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di pusat maupun daerah untuk menindaklanjuti usulan proyek khususnya yang menjadi tanggung jawab Indonesia sebagai spearhead untuk lima komoditas (jagung, kelapa, karet, tuna, dan rumput laut).</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Disepakati dalam pertemuan bahwa <i>Joint Venture on Hybrid Rice Production Project</i> tidak diperpanjang dan akan diselesaikan hingga akhir tahun 2016 sebagaimana disetujui pada pertemuan SPM 2015. - Perwakilan dari SLAC menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan negosiasi dengan potential <i>private sector</i> dalam kerjasama riset terkait <i>hybrid rice</i>. <p>b. <u><i>Hybrid Corn</i></u> Disepakati dalam pertemuan WG bahwa kegiatan <i>Hybrid Corn Production Project</i> akan diperpanjang dan dimasukkan kedalam BEV 2025</p> <p>c. <u><i>BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Fair and Business Leaders Conference</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perwakilan Indonesia menyampaikan update persiapan pelaksanaan The 3rd BIMP EAGA dan IMT GT <i>Trade Expo, Business Conference</i> dan <i>Business Matching</i> akan diselenggarakan pada 14-16 Oktober 2016 di Hotel Four Points Sheraton, Makassar, Sulawesi Selatan, dengan mengangkat tema "<i>Strengthening the ASEAN Maritime Corridors and Food Security</i>" - Diharapkan 10 provinsi dari Sumatera dan 15 Provinsi dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Papua Barat dapat berpartisipasi dalam acara tersebut. - Beberapa agenda dalam pertemuan tersebut yaitu : (a) <i>Business Conference</i>, (b) <i>Trade Expo</i>, (c) <i>Business Matching and Investment Forum</i>, (d) <i>Health Care Tourism Dialogue</i>, (e) <i>East ASEAN Street Food Festival</i>, (f) <i>Culture and Art Performance</i>, (g) <i>Fashion Show</i> - Khusus untuk pameran, disediakan 300 | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>booth, dimana 100 diantaranya akan digunakan oleh Indonesia. Negara anggota BIMP EAGA diharapkan dapat berpartisipasi dalam pameran sebanyak 50 booth. Booth yang disediakan berukuran 2x3 m²</p> <p>II. BEV 2025 GOS, <i>Future Strategic Directions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat cluster Filipina menyampaikan output dari konsultasi <i>Food Basket</i> sektor, hasil pertemuan ke 3 <i>Agribusiness Cluster Meeting</i> di Langkawi Malaysia. Review tersebut bertujuan agar selaras dengan BEV 2015 dengan menekankan pada hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Sector goal</i>: Mewujudkan komoditi pertanian maupun perikanan yang berkelanjutan, kompetitif, tahan terhadap perubahan iklim b. <i>Sector Objective</i> : (1) Ketahanan pangan jangka panjang untuk kawasan sub regional, (2) Promosi produk pertanian dan perikanan untuk tujuan ekspor, (3) Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan wilayah BIMP EAGA - Oleh karena itu cluster telah mengidentifikasi sebanyak 10 strategi dan kegiatan pendukung dari masing-masing cluster. <p>III. <i>Project Ideation</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perumusan <i>Project Ideation</i> 2017-2025 mengacu pada formulasi <i>Goal Objective</i> dan <i>Strategies</i> dalam rangka mendirikan <i>Food Basket Sector</i>, dimana dalam mengajukan proposal harus melibatkan minimal 2 (dua) negara dengan mempertimbangkan <i>comparative advantages</i> dari masing-masing |
|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| | | | | <p>cluster dan upaya mendukung <i>food security</i> di wilayah BIMP EAGA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam melakukan identifikasi dan menentukan prioritas kegiatan cluster melakukan pendekatan per komoditas, dimana telah disusun dan disetujui 12 komoditas untuk ditindaklanjuti berupa proposal kegiatan. Dari keseluruhan project tersebut telah ditentukan pelaksana/<i>spearhead</i> dari masing-masing komoditi berdasarkan kesepakatan dari seluruh perwakilan delegasi BIMP pada <i>Agribusiness cluster</i>. - Filipina selaku tuan rumah mengajukan diri untuk menjadi <i>spearhead</i> untuk komoditi beras, udang, pisang, <i>Poultry</i> (ayam dan bebek), <i>HV Fisheries</i>, dan <i>organik product</i>. Sementara itu Malaysia bertindak sebagai <i>spearhead</i> untuk komoditi minyak sawit, dan halal <i>product</i>. - Adapun Indonesia menjadi <i>spearhead</i> untuk 5 (lima) komoditi yaitu jagung, kelapa, karet, tuna, dan seaweed, dimana dari keseluruhan produk tersebut, 4 diantaranya telah dipresentasikan yaitu (1) <i>Integrated Coconut Production of Smallholder farmers in BIMP EAGA</i>, (2) <i>Integrated Seaweed Production of SME Farmers in BIMP EAGA</i>, (3) <i>Integrated Livestock Zone</i> (4) <i>Commercial Production of Hybrid Corn for Food Security and Sustainability</i>). - Untuk mendukung upaya tersebut, cluster juga akan mengoptimalkan isu halal dan organik <i>value chain</i>. | |
| KERJASAMA MULTILATARAL | | | | | |
| 1. | 28-29 Januari 2016 BB Biogen, Bogor | Rapat Tindak Lanjut KTM WTO ke-10 | IPB, Kemenlu, perwakilan Eselon I lingkup Kementan | 1. Hasil KTM WTO ke-10 dinilai cukup berhasil untuk menyepakati beberapa hal tentang: | Komitmen Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|
| | | | | <p>a. <i>Nairobi Package</i> di Sektor Pertanian, meliputi: <i>Ministerial Decision on Special Safeguard Mechanism, Public Stockholdings for Food Security Purposes, Export Competition and Cotton</i></p> <p>b. <i>Nairobi Ministerial Declaration Part III</i> yang berisi: Negara-negara anggota akan merundingkan kembali isu-isu Doha, termasuk isu pertanian yang terdiri dari 3 (tiga) pilar utama, yaitu: <i>domestic support, market access</i> dan <i>export competition</i>.</p> <p>c. <i>WTO Informal Ministerial Meeting, Davos, 23 Januari 2016</i>, yaitu pertemuan informal anggota WTO dan <i>brainstorming</i> untuk mendorong proses pembangunan, isu investasi, isu kompetisi, serta perlunya <i>inclusiveness</i></p> <p>d. Proposal perundingan pertanian, mempertimbangkan kesamaan pandangan seluruh pemangku kepentingan yang mutlak diperlukan dan kejelasan arah kebijakan perdagangan produk pertanian Indonesia</p> <p>2. <i>Next Short Term Agenda</i></p> <p>a. Mengidentifikasi jenis dan besaran subsidi ekspor pertanian di Indonesia</p> <p>b. Mempelajari dampak penghapusan subsidi ekspor pertanian, termasuk ekspor kredit terhadap daya saing ekspor pertanian Indonesia</p> <p>c. Mempelajari dampak penghapusan subsidi ekspor d negara maju terhadap daya saing ekspor impor dan dan produksi produk pertanian Indonesia yang diimpor.</p> | <p>difokuskan pada pencapaian swasembada pangan, khususnya untuk swasembada tujuh komoditas, yaitu padi, jagung, kedelai, daging, tebu, cabai dan bawang merah. Sedangkan komoditas lainnya yang tidak termasuk harus mempunyai daya saing yang harus dilindungi oleh Pemerintah, intinya <i>protect our farmers</i> dan jika dihubungkan dengan hasil-hasil KTM WTO bahwa yang perlu dijembatani adalah terkait SSM dan tarif. Usulan produk pertanian yang masih perlu kita lindungi sehingga bisa memecahkan solusi menjembatani supaya produk pertanian dapat berdaya saing tinggi.</p> |
| 2. | 1 Pebruari 2016 Kementerian Luar Negeri | Rapat <i>Intergovernmental Platform On Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)</i> | Kemenlu, Kementerian LH dan Kehutanan, LIPI, IPB dan Kementan | Rapat membahas pengertian IPBES, bagaimana posisinya saat ini dan agenda yang akan dibahas pada saat pelaksanaan sidang yang memerlukan dukungan seluruh Kementerian terkait agar ada pengesahan dan Peraturan Presiden | 1. Pihak Kemenlu akan segera mengirimkan Surat Permintaan Delri ke Kementan untuk menghadiri sidang tersebut, serta meminta bahan masukan |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|
| | | | | | <p>secara tertulis untuk substansi agenda sidang yang akan dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia.</p> <p>2. Pihak Kemenlu akan melaksanakan rapat teknis khusus Pollination mengundang seluruh Badan Litbang K/L terkait untuk persiapan sidang</p> <p>3. Indonesia mencalonkan 2 (dua) orang sebagai anggota Biro IPBES Asia Pasifik, yaitu: Prof. Dedi Darnaedi (LIPI) dan Ratna Kusuma Sari (Kementerian LH dan Kehutanan)</p> |
| 3. | 12-13 Pebruari 2016 BB Biogen, Bogor | Rapat Pembahasan Implementasi Cetak Biru G20 | Bappenas, Kemlu, serta perwakilan unit teknis Eselon I lingkup Kemtan | Rencana tindak lanjut G20 di tahun 2016 | <p>1. Pemerintah RI telah menyusun "Cetak Biru Peran Indonesia pada G20 Tahun 2015–2019" sesuai amanat RPJMN.</p> <p>2. Pemerintah bersama K/L terkait akan mempersiapkan National Actions dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam Collective Actions pencapaian SDGs, khususnya yang terkait dengan agenda FSN.</p> |
| 4. | 15 Pebruari 2016 Kementerian Perdagangan | Rapat Persiapan Sidang CoA | Kemendag, Kemtan | <p>1. Agenda pembahasan CoA SS terkait house keeping (bagaimana mengelola proses perundingan)</p> <p>2. Pending issues notifikasi dan posisi SSM, PSH dalam proposal yang belum diajukan kepada Sekretariat WTO</p> | Badan Karantina Pertanian akan melaksanakan rapat dengan mengundang instansi terkait pada tanggal 18-19 Februari 2016 di Bogor |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|---|--|
| 5. | 16 Pebruari 2016 Kementerian Pertanian | Rapat Pembahasan Kerja Sama antara Kementerian Pertanian dan IDH <i>International Trade Initiative</i> | Kemendag, Kemenlu, Kemsekneg, BIN, BAIS, dan perwakilan unit teknis Eselon I lingkup Kementan | Program IDH Indonesia yang akan dituangkan dalam Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Kemtan dengan IDH <i>International Trade Initiative</i> | Membahas dan menyusun MSP lebih lanjut ke dalam rapat dengan mengundang kembali Tim Pokja Perijinan Ormas Asing |
| 6. | 18-20 Pebruari 2016 Bogor | Rapat Pembahasan Posisi Indonesia untuk Sidang <i>Committee on Agriculture (CoA)</i> | Kemlu, Kemdag, Bulog, Kemtan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan mengenai SSM dan PSH masih menjadi mandate perundingan WTO yang wajib diselesaikan 2. Untuk SSM, Indonesia sudah memiliki usulan proposal baru dengan posisi yang lebih rileks dibandingkan dengan proposal sebelumnya, demikian juga untuk PSH, Indonesia telah memiliki proposal untuk <i>permanent solution</i> | Pertemuan teknis Tim Satgas G-33 untuk lebih memantapkan posisi sektor pertanian pada sidang CoA |
| 7. | 29 Februari 2016 Bogor | Rapat Pembahasan Penyusunan Posisi Runding Indonesia untuk Sidang Trade Policy Review (TPR) ke-6 Turki di WTO tanggal 15-17 Maret 2016 | Kemlu, Kemdag, BSN KKP, Kemtan | Posisi runding Indonesia untuk Sidang <i>Trade Policy Review (TPR)</i> ke-6 Turki di WTO tanggal 15-17 Maret 2016 | Menyiapkan jawaban atas pertanyaan (<i>concern</i>) Indonesi atas kebijakan terkait perdagangan Turki yang berpotensi menghambat ekspor Indonesia ke Turki |
| SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| 1. | 12 Januari 2016 Hotel Lor In Sentul Bogor | Reviuw RKA-KL Lingkup Sekretariat Jenderal Kementan | Itjen Kementan Unit Eselon II Lingkup Kementan | <p>Hasil-hasil reviuw antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pagu anggaran Pusat Kerja Sama Luar Negeri TA 2016 tidak mengalami refocusing karena pagu anggaran telah disusun sesuai dengan struktur organisasi yang mengalami perubahan pada TA 2016, yaitu 3 bagian pada saat Pusat KLN menjadi 4 bagian pada saat berubah menjadi Biro KLN, sehingga apabila akan dilakukan refocusing akan mengganggu kinerja organisasi. 2. Terdapat kegiatan yang kurang tepat yaitu materi publikasi terkait kerjasama KSST yang menggunakan 521219 dengan volume sebanyak satu paket senilai Rp. 100.000.000,- | |

| | | | | | |
|----|---|---|--------------------------------|---|--|
| | | | | <p>berdasarkan kondisi tersebut telah dilakukan tindak lanjut melalui revisi akun menjadi 521211 (belanja bahan) dengan redaksi cetakan dan materi publikasi terkait kerjasama KSST.</p> <p>3. Kegiatan yang menggunakan 521219 diharapkan dipindahkan ke akun yang lebih sesuai.</p> | |
| 2. | 21 Januari 2016 Ruang Rapat Unit Pengadaan Gedung B | Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) TA 2016 | Unit Eselon I Lingkup Kementan | <p>1. Pertemuan Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) TA 2016 menjelaskan bahwa dalam pengadaan lelang dana alokasi harus di input dalam aplikasi SIRUP.</p> <p>2. Dalam pelaksanaan kegiatan TA 2016 Pengadaan Barang (Belanja Modal) harus mengikuti prosedur atau ketentuan yang telah dituangkan dalam PMK, dan melalui proses e-tendering (Lelang), e-purchasing, e-katalog, penunjukan langsung dan pengadaan langsung.</p> | |
| 3. | 9-10 Pebruari 2016 Cipayung Bogor | Pelatihan Penetapan Tarif dan <i>Rules of Origin</i> (ROO). | Unit Eselon I Lingkup Kementan | <p>Beberapa point arti penting kebijakan tariff bea masuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya saing produk Indonesia di Pasaran Internasional; 2. Melindungi konsumen dalam Negeri; 3. Mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional dalam rangka mendukung terciptanya perdagangan bebas. <p>Lebih lanjut, dalam penyusunan tarif harus memperhatikan skema tarif masuk yang telah tertuang dalam aturan <i>World Trade Organization</i> (WTO), yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bound Tarif WTO 2. Applied Tarif 3. Bea Masuk Khusus | |

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|
| | | | | <p>Ketentuan Asal barang terbagi dalam 2 betuk yakni, <i>Wholly Obtained</i> (WO) dan <i>Non-Wholly Obtained</i>. <i>Wholly Obtained</i> merupakan barang yang diambil langsung dari dan atau diproduksi di suatu negara, barang sisa produksi dan konsumsi. Sedangkan <i>Non-Wholly Obtained</i> yang dihasilkan memperhatikan kandungan regional, <i>Non-Wholly Obtained</i> terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Produced Exclusively</i> (terdiri dari satu atau lebih negara anggota) <i>Regional Value Content</i> (RVC)(Kandungan nilai regional minimal 40 %) <i>Change in Tariff Classification</i> (mengalami perubahan HS) <i>Product Specific Rule</i> (telah dilakukan proses khusus membuat produk) | |
| 4. | 10 Pebruari 2016 Biro Keuangan dan Perlengkapan | Rapat Penyusunan Draft JRA Fasilitatif | Unit Eselon II Lingkup Sekjen dan Itjen Kementan | <ol style="list-style-type: none"> Menurut UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, merupakan daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan/retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisikan rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan/ditinjau kembali dan dipermanenkan. JRA terbagi 2 (dua) yaitu fasilitatif dan substantif, fungsi fasilitatif merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administrasi/ penunjang. Sedangkan fungsi substantif merupakan kegiatan pelaksanaan tugas pokok kementerian dalam hal ini adalah Ditjen teknis terkait. Diharapkan untuk tahun 2016 ini di masing-masing Unit Eselon II Lingkup Setjen ada penyusutan arsip yang mana jadwal Draft JRA bisa dicermati dan dikoordinasikan kembali | Diminta segera melakukan koordinasi dengan unit bagian dibawahnya untuk menentukan masa aktif / jangka waktu penyimpanan arsip di tiap-tiap unit kerja, agar penyusunan draft Revisi JRA dapat segera terselesaikan dan dapat disahkan oleh Bapak Sekjen Kementan beserta ANRI untuk nantinya bisa menjadi pedoman didalam proses penyusutan arsip di Kementan. |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|--|--|
| | | | | apakah sudah sesuai jadwal rentensi arsip fasilitatif. Untuk Biro KLN draft jadwal arsip fasilitatif ada perubahan sesuai struktur organisasi baru sesuai Permentan No. 43/Permentan/ OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Mentan.. | |
| 5.. | 16 Pebruari 2016 Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Bogor | Pembahasan perubahan Peraturan Menpan & RB | Unit Eselon I dan Eselon II Lingkup Setjen Kementan | <p>Hasil usulan atas perubahan terhadap pembahasan, perubahan Kementan Nomor 4668/Kpts/OT.160/9/2003 lingkup Kementan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penamaan, singkatan dan akronim instansi pemerintah, selama ini belum digunakan secara tepat, benar dan konsisten, belum ada keseragaman dan kesamaan pemahaman dalam pembentukan/ penyusunannya, akibatnya proses komunikasi kurang lancar antara Instansi Pemerintah dan Para Pemangku Kepentingan. 2. Tuntutan pelayanan yang berkualitas dan meningkatnya penggunaan TI dalam rangka efektifitas dan efisien proses manajemen pemerintah dan tata kelola pemerintah yang baik. 3. Pedoman penamaan, singkatan dan akronim instansi pemerintah merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam membentuk penamaan, singkatan dan akronim pada masing-masing instansi. | |
| 6. | 24 Pebruari 2016 Kanwil Ditjen PBN Provinsi DKI Jakarta | Sosialisasi PMK 160/PMK.05/ 2016 dan PMK.154/PMK.05/2015. | Kementerian Teknis terkait. | 1. Mekanisme pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran Dalam Negeri harus mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan yaitu Ditjen Pengelolaan Anggaran dan menunjuk Bank-Bank Pemerintah sesuai bank Indonesia. Setelah mendapat persetujuan pembukaan rekening baru koordinasi dengan KPPN dan Bank yang ditunjuk Satker Atase Teknis Kementerian terkait. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | <p>2. Mekanisme pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri bahwa untuk perjalanan pejabat ke Luar Negeri pasal 9 waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi pulang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waktu yang digunakan oleh Moda Transportasi - Waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi pulang - Waktu tempuh dari Bandara/Stasiun/Pelabuhan/Terminal bus ke tempat tujuan di luar negeri atau tempat tujuan di dalam negeri dan kembali ke tempat bertolak di dalam negeri atau tempat kedudukan di luar negeri. <p>3. Bahwa uang harian dapat dihitung berangkat dan pulang hanya mendapatkan 40% atau kebijakan pimpinan uang harian bisa mendapatkan 100% dan juga biaya asuransi.</p> | |
| 7 | 25-26 Pebruari 2016 Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor | Pertemuan Koordinasi Pemantauan dan Pelaporan Aplikasi MONEV (SMART) Tahun 2015 dan Konfirmasi Laporan MONEV (SMART) Tahun 2016 | Unit Eselon I Lingkup Kementan dan Eselon II Lingkup Setjen | <p>1. Evaluasi Aplikasi Monev (SMART) PMK 249/2011 tahun 2015 yang belum begitu sempurna apabila dibandingkan dengan Aplikasi Online Monitoring SPAN di Aplikasi MONEV PMK 249/2011.</p> <p>2. Arahan Menkeu untuk Aplikasi kedepan data yang ada di Aplikasi SMART akan sama dengan data yang ada di Online Monitoring SPAN. Oleh karena itu Aplikasi in akan disempurnakan dalam Aplikasi Monev (SMART) PMK 249/2011 tahun 2016.</p> <p>3. Untuk ADIK sebagai implementasi penganggaran berbasis kinerja tentang penelaahan informasi kinerja hasil penataan arsitektur dan informasi kinerja Kementan.</p> | Pengembangan dan perbaikan aplikasi, perbaikan tingkat kedisiplinan Satker dalam mengisi data pada aplikasi MONEV, dan terjalannya koordinasi pengelola Monev Lingkup Eselon I. |

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|
| 8. | 26 Pebruari 2016 Bogor | Rapat Inventarisasi dan Pemetaan Kegiatan Revolusi Mental Lingkup Kementerian Pertanian | Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian | <p>Dalam pertemuan tersebut dihasilkan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi Birokrasi dan kegiatan Rencana Aksi Revolusi Mental dan membahas program-program yang telah dikerjakan dan akan dilaksanakan yang terkait dengan pembinaan mental kepegawaian. 2. Program Revolusi Mental (PERMEN PAN & RB Nomor 11 Tahun 2015). 3. Gerakan Revolusi Mental Nasional dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) 4. Program Revolusi Mental secara nasional ada 3 (tiga) yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Integritas sebagai kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat, berkata dan berlaku jujur, berpegang teguh pada prinsip kebenaran, moral dan etika (Jujur, Dapat di Percaya, Berkarakter, Bertanggung Jawab dan Konsisten). - Etos Kerja sebuah sikap yang berorientasi pada hasil yang terbaik, semangat tinggi dalam bersaing, optimis dan selalu mencari cara-cara yang produktif (daya Saing, Optimis, Inovatif dan Produktif) - Gotong Royong sebagai keyakinan mengenai pentingnya melakukan kegiatan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan cepat, efektif dan efisien (Kerjasama, Solidaritas, Tolong Menolong, peka dan Berorientasi pada Kemaslahatan). | Inventarisasi dan pemetaan pelaksanaan kegiatan Revolusi Mental lingkup Kementan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan di Unit Eselon I Kementan ini akan disampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). |
| 9. | 29 Pebruari 2016 Kementerian Luar Negeri | Rapat Koordinasi Implementasi PMK 160 oleh Satker Atase Teknis | Kementerian Teknis | Pada saat ini BPKRT diangkat sebagai BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) di Luar | |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|
| | | di Luar Negeri | | <p>Negeri sehingga Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengharapkan untuk Satker Atase Teknis pada Perwakilan RI di Luar Negeri agar membuka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Rekening Bendahara Pengeluaran Dalam Negeri 2). Rekening Vallas dan 3). Rekening Return di Luar Negeri. <p>Adapun pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran Dalam Negeri harus mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan yaitu Ditjen Pengelolaan Anggaran dan menunjuk bank-bank pemerintah sesuai Bank Indonesia. Setelah mendapat persetujuan pembukaan rekening baru koordinasi dengan KPPN dan bank yang ditunjuk Satker Atase Teknis Kementerian terkait.</p> <p>Selama ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dirangkap Kementerian Luar Negeri untuk Tahun 2016 Atani Teknis diharuskan membuka Rekening. Besaran UP (Uang Persediaan) kalau di Indonesia Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sedangkan kalau Luar Negeri tergantung Kementerian Luar Negeri. Sesuai PMK 160 PPK boleh dilakukan Atase Teknis dan mekanismenya lebih flexibel untuk dipertanggungjawabkan sendiri baru Kementerian Luar Negeri membantu BPP nya mengenai pekerjaan substansinya dan pendanaan untuk dikelola dengan baik.</p> | |
| 10. | 1-29 Pebruari 2016 Biro KLN Kementan | Penugasan Pejabat / Pegawai Kementan ke Luar Negeri | Setneg RI, Kemenlu, KB Negara Terkait, Eselon I Lingkup Kementan | Telah diproses penugasan pejabat/pegawai Kementan ke luar negeri sebanyak 71 orang yaitu mengikuti workshop/seminar sebanyak 7 orang, menghadiri pertemuan/sidang sebanyak 24 orang, mengikuti pelatihan/training sebanyak 33 orang, program S2 sebanyak 1 orang. | Berkas/dokumen perjalanan pejabat/pegawai yang bersangkutan telah dikirim ke Setneg RI untuk memperoleh surat persetujuan Sekneg RI dan ke Kemenlu untuk memperoleh Exit Permit serta Kedutaan Besar Negara terkait untuk memperoleh |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|
| | | | | | visa. |
|--|--|--|--|--|-------|